

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Okam dan Lawal (2011) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana edukatif dalam keadaan berdaulat dimana warga negara menjadi sadar secara sosial dan politik, terintegrasi secara sosial ke dalam lingkungan sosial, memperoleh keterampilan dan kompetensi sosial, mempunyai tanggung jawab sosial untuk produktivitas dan pengembangan secara maksimal, semua demi kepentingan Negara. Soemantri (2001) memaparkan bahwa PKn sebagai program pendidikan yang melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sependapat dengan ungkapan Departemen Pendidikan Nasional (2006, hlm. 49) mengenai tujuan pembelajaran PKn dalam memberikan kompetensi, sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tantangan globalisasi di abad 21 menuntut setiap orang menjadi warga negara yang memiliki kecakapan berpikir kritis. Dalam *Partnership for 21st Century Skills* dikatakan bahwa kecakapan abad 21 mencakup (a) *critical*

*thinking and problem solving*, (b) *communication and collaboration*, dan (c) *creativity and innovation*. Lebih lanjut, Cogan & Derricott (1998) mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki warganegara di abad 21 ini salah satunya yaitu kemampuan berpikir kritis dan sistematis, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. Karakteristik yang harus dimiliki warga negara pada abad 21 ini mengarah pada pembentukan kecakapan kewarganegaraan. Kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara (Arif, 2008). Diperkuat oleh pendapat Quigley, dkk. (1991, hlm. 39) menyatakan dimensi kecakapan kewarganegaraan dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan “...*the knowledge and skills required to participate effectively, practical experience in participation design to foster among students a sense of competence and efficacy*”, dan mengembangkan “...*an understanding of the importance of citizen participation*”. Pembelajaran PKn di persekolahan menjadi wahana tempat pengembangan pembelajaran yang mampu menciptakan warga negara yang baik dan cerdas, serta memiliki kecakapan pada abad 21.

Namun demikian, jika melihat realita pembelajaran PKn saat ini di Indonesia menurut pengamatan Kerr (1999) menunjukkan kategori minimal yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Sementara itu Soemantri (2001, hlm. 245) mempertegas bahwa “Kurang bermaknanya PKn bagi peserta didik dikarenakan masih dominannya penerapan metode pembelajaran konvensional seperti *ground covering technique, indoktrinasi, narrative technique* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sehari-hari”. Pandangan ini dapat mengakibatkan guru tidak dapat berimprovisasi secara kreatif dan inovatif, sehingga pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik melalui pelibatangannya secara proaktif dan

interaktif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, menurut Wahab & Sapriya (2008) menyatakan bahwa “selama ini peserta didik beranggapan pelajaran PKn itu tidak menarik dan membosankan”. Kesan ini timbul dikarenakan secara substantif pelajaran PKn kurang menyentuh kebutuhan peserta didik. Guru kurang memunculkan permasalahan aktual yang dihadapi peserta didik sebagai warga negara muda dan kurang mengarahkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya dan mendorong peserta didik agar aktif dalam pembelajaran.

Permasalahan tersebut harusnya perlu dikembangkan “*critical thinking and participation*” dalam model pembelajaran yang inovatif sebagai cara tindak lanjut agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis rasional dan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan pengembangan kecakapan intelektual dan kecakapan partisipatif, yang memungkinkan warga untuk berpikir dan bertindak atas nama hak-hak individu dan kepentingan umum mereka (Patrick, 1995). Menurut Branson (1998), kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual (*intellectual civic skills*) dan kecakapan berpartisipasi (*participatory civic skills*). Kecakapan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah kecakapan berpikir kritis. Sedangkan kecakapan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.

Salah satu cara adaptif dalam pembelajaran PKn dapat diatasi dengan mengupayakan pembaharuan dalam paradigma pembelajaran berupa penggunaan model yang tepat dalam pembelajaran PKn di persekolahan. Salah satu model pembelajaran yang tepat terkait pengembangan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi peserta didik yaitu model *cooperative learning*. *Cooperative learning* sebagai suatu model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, karena pendekatan ini memandang proses belajar benar-benar berlangsung secara kolaboratif. Prinsip utama dari *cooperative learning* adalah terjadi proses membantu antar peserta didik, sehingga dapat belajar bersama dan mencapai tujuan bersama. Pada model *cooperative learning* peserta didik

diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas peserta didik. Artinya dalam pembelajaran ini kegiatan aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik dan mereka bertanggung jawab atas hasil pembelajarannya (Isjoni, 2009). Model *cooperative learning* dianggap tepat dalam mengatasi permasalahan di atas, karena: 1) dapat meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik, 2) peserta didik dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang, 3) mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat dan bekerja dalam kelompok (Majid, 2013, hlm. 175).

Berdasarkan Raphael, Bachen, & Ramos (2012, hlm. 1324), “*Cooperative learning is rooted in educational theorists’ recognition that collaborative knowledge and skills are increasingly valuable for contemporary work and citizenship*”. Zea et al. (2009) memaparkan mengenai *cooperative learning* dapat mendorong peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkelompok, seperti: kepemimpinan, membangun konsensus, negosiasi, debat, dan kemampuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran melalui kelompok kecil. Menurut Chikering and Gamson (1987) dalam Budimansyah, Suparlan, dan Meirawan (2009), model pembelajaran yang aktif dapat dinilai dapat menciptakan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran di kelas (*creating excitement in the classroom*), dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berpikir dan bekerja sesuai pengetahuan yang dimiliki (*getting student to think and work*). Pembelajaran di kelas, hendaknya guru mendorong peserta didik untuk lebih banyak melakukan sesuatu daripada hanya sekedar mendengarkan (*student must do more than just listen*). Peserta didik diajak untuk mendiskusikan dan terlibat secara aktif dalam pemecahan berbagai masalah (*they must read, write, discuss, or be engaged in solving problems*), serta dilibatkan secara aktif dalam proses berfikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, sehingga akan tercipta suatu kondisi belajar yang menyenangkan dan komunikatif. Sesuai

yang diungkapkan oleh Carpenter and Archer (2012) yakni pembelajaran yang efektif dikelas dapat menjadikan peserta didik mempunyai kecakapan dalam mendengarkan, berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, memotivasi, dan pemecahan masalah, dan melatih bekerjasama dalam kelompok.

Slavin dalam Igba & Nwafor (2016, hlm 154) menyatakan bahwa "*Cooperative instructional strategy is a means of providing students with the opportunities to work together as a team in accomplishing a set of given objectives*". Strategi *cooperative learning* dapat meningkatkan pengembangan berpikir kritis melalui keputusan, menemukan ide, dan memecahkan masalah sesuai dengan pengetahuannya, sebab strategi pembelajaran kooperatif memberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain (Oleabhiele, 2011). Hal ini sesuai dengan teori kecakapan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Carpini and Keeter (2008) dalam Adebayo dan Zimba (2014, hlm. 426) bahwa "*Civic skills refer to citizens' ability to analysis, evaluate, take and defend positions on public issues, and to use their knowledge to participate in civic and political processes*". Oleh sebab itu, *cooperative learning* sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan. *Cooperative learning* dapat membentuk kecakapan peserta didik yang merujuk pada kemampuan warga negara untuk analisis, mengevaluasi, mengambil dan mempertahankan posisi isu-isu publik, dan untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam berpartisipasi di ranah kewarganegaraan dan proses politik.

Hal ini menunjukkan pentingnya pembelajaran PKn yang dapat membekali peserta didik kecakapan menjadi warga negara yang baik. Bronson dalam Budiarta (2013) memberikan pengertian kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Branson (1998), kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan intelektual (*intellectual civic skills*) dan kecakapan berpartisipasi (*participatory civic skills*). Kecakapan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung

jawab antara lain adalah kecakapan berpikir kritis. Sedangkan kecakapan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.

Banyaknya permasalahan di atas merupakan tantangan dalam pengembangan pembelajaran PKn di satuan tingkat pendidikan modern. Kondisi tersebut membutuhkan perubahan penggunaan model pembelajaran agar peserta didik mempunyai kemampuan kecakapan kewarganegaraan dalam berpikir kritis dan berpartisipasi guna mewujudkan peserta didik yang *smart and good citizen*. Implementasi model *cooperative learning* diperlukan dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di SMP Negeri 1 Klaten, karena dengan adanya penerapan *cooperative learning* memudahkan peserta didik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dalam kelompok kecil mereka ataupun dengan kelompok lain, mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dengan baik, dan memecahkan permasalahan yang sedang dikaji.

Bertolak dari pendapat di atas, peneliti tertarik menganalisis model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klaten. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik meneliti permasalahan yang berjudul **“Implementasi Model *Cooperative Learning* dalam Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Peserta Didik di SMP Negeri 1 Klaten”**.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan apa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Model pembelajaran masih bersifat konvensional yang disebabkan luasnya materi PKn dan kurangnya waktu pembelajaran jika digunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
2. Pembelajaran PKn bukan hanya mengembangkan pengetahuan, namun harus lebih mengutamakan ketiga komponen kewarganegaraan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

3. Tidak seimbangnya antara intelektual dan partisipasi peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran.
4. Kurangnya kekritisan peserta didik dan kurangnya partisipasi peserta didik dalam merespon masalah yang ada di lingkungan sekitar terkait kebijakan publik ataupun fenomena sosial politik yang terjadi di masyarakat.
5. Diperlukan terobosan bagi upaya menanggapi berbagai permasalahan pembelajaran yang melibatkan peserta didik mempunyai kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi yang baik.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa perlu mengimplementasikan model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten?
2. Bagaimana implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten?
3. Bagaimana peningkatan kecakapan kewarganegaraan peserta didik setelah mengimplementasikan model *cooperative learning*?
4. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten?
5. Bagaimana upaya guru PKn mengatasi hambatan dalam implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn sangat efektif dan bagaimana proses pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Klaten dengan menggunakan pendekatan tersebut dalam rangka

meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa perlu mengimplementasikan model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peningkatan kecakapan kewarganegaraan peserta didik setelah mengimplementasikan model *cooperative learning*.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya guru PKn mengatasi hambatan dalam implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik di SMP Negeri 1 Klaten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoritis, segi kebijakan, dan segi praktik.

1. Dari segi teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:
  - a. Guna memberi sumbangan secara konseptual mengenai strategi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik.
  - b. Mengembangkan konsep-konsep baru tentang cara dan upaya melakukan pembelajaran inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan dalam hal kecakapan berpikir kritis dan kecakapan berpartisipasi peserta didik.

- c. Melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema mengenai implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik, sehingga dapat memperkaya dan memperkuat khasanah keilmuan PKn.
2. Dari segi kebijakan, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:
    - a. Membantu mensosialisasikan pentingnya implementasi model *cooperative learning* dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan, agar pembelajaran PKn kedepannya lebih berkualitas.
    - b. Sebagai bahan evaluasi pihak sekolah dalam penggunaan model pembelajaran yang semestinya disesuaikan dengan pembaharuan kurikulum PKn.
    - c. Menumbuhkan kesadaran dan kemampuan pihak dinas setempat terkait proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tuntutan sosio-kultural dan sosio-pedagogis sekolah.
  3. Dari segi praktis, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:
    - a. Bagi guru, dapat mengimplementasikan model *cooperative learning* sebagai alternatif dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik.
    - b. Bagi peserta didik, dapat memotivasi untuk mengembangkan kecakapan kewarganegaraan dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
    - c. Bagi sekolah, dapat mengoptimalkan proses pembelajaran melalui implementasi model *cooperative learning* dalam pembelajaran PKn, sehingga kecakapan kewarganegaraan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran.

## F. Struktur Organisasi Tesis

Dalam tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab tersebut meliputi:

1. BAB I Pendahuluan, terdiri atas: (a) identifikasi masalah penelitian, (b) rumusan masalah penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) struktur organisasi tesis.
2. BAB II Kajian Pustaka, terdiri atas: (a) kajian tentang pendidikan kewarganegaraan, (b) kajian tentang kecakapan kewarganegaraan, (c) kajian tentang model *cooperative learning*, (d) model *cooperative learning* dalam meningkatkan kecakapan kewarganegaraan peserta didik, (e) penelitian terdahulu yang relevan, dan (f) kerangka penelitian.
3. BAB III Metode Penelitian, terdiri atas: (a) desain penelitian, (b) partisipan dan tempat penelitian, (c) definisi operasional, (d) instrumen penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) keabsahan data, (h) isu etik, dan (i) paradigma penelitian.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, terdiri atas: (a) gambaran umum lokasi penelitian, (b) hasil temuan penelitian, dan (c) pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, terdiri atas: (a) simpulan, (b) implikasi, dan (c) rekomendasi.